

Prinsip Dasar Monev dan Efektivitas Penyerapan Anggaran

Diskusi Teknis Bappeda Provinsi DI Yogyakarta
22 Feb 2012

Dr. Wahyudi Kumorotomo

Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

081 328 488 444

Mengapa monitoring dan evaluasi diperlukan ?

1. Akuntabilitas kebijakan (siapa yang mendapat manfaat dari kebijakan tersebut?)
2. Untuk mengetahui kesalahan dalam implementasi sebelum evaluasi (*impact assesment*) dilakukan.
3. Sebagai bahan untuk memutuskan apakah kebijakan yang bersangkutan layak diteruskan.

(Rossi, et.al, *Evaluation*, Ch. 4)

Tujuan monitoring dan evaluasi

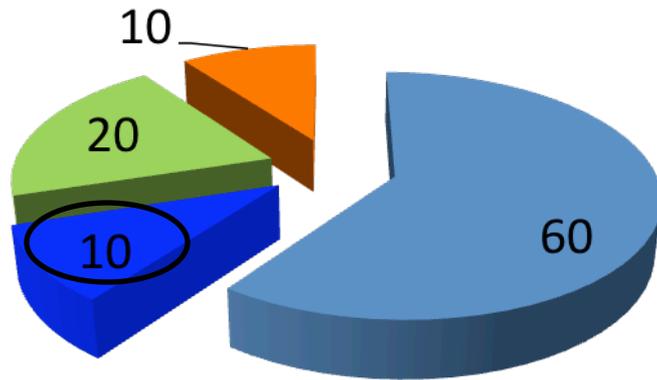
1. *Compliance*. Apakah tindakan administrator, pelaksana dan stakeholders sesuai dengan petunjuk pelaksanaan ?
2. *Auditing*. Apakah sumberdaya dan pelayanan benar-benar dinikmati oleh kelompok sasaran dan pemanfaat yang telah ditentukan ?
3. *Accounting*. Memperhitungkan perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pelaksana kebijakan dan program pemerintah.
4. *Explanation*. Mengapa hasil dan dampak kebijakan pemerintah bisa berbeda-beda ? Komponen kebijakan mana yang bekerja paling efektif ? Bagaimana bekerjanya ? Mengapa ?

Masalah Pokok Anggaran Publik di Indonesia

1. Ekonomi tumbuh (prediksi 2012: 6,3%), tetapi bukan karena didukung anggaran pemerintah.
2. Mekanisme APBN dan APBD tidak sinkron.
3. Peran anggaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat semakin turun.
4. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin).
5. Prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
6. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah.

Dana Pembangunan Sudah Didaerahkan (?)

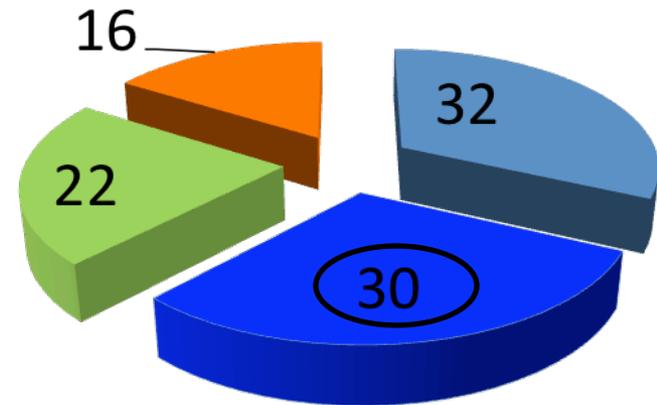
Significant portion transfer increased to Local Government in the state Budget



■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

2000

2010

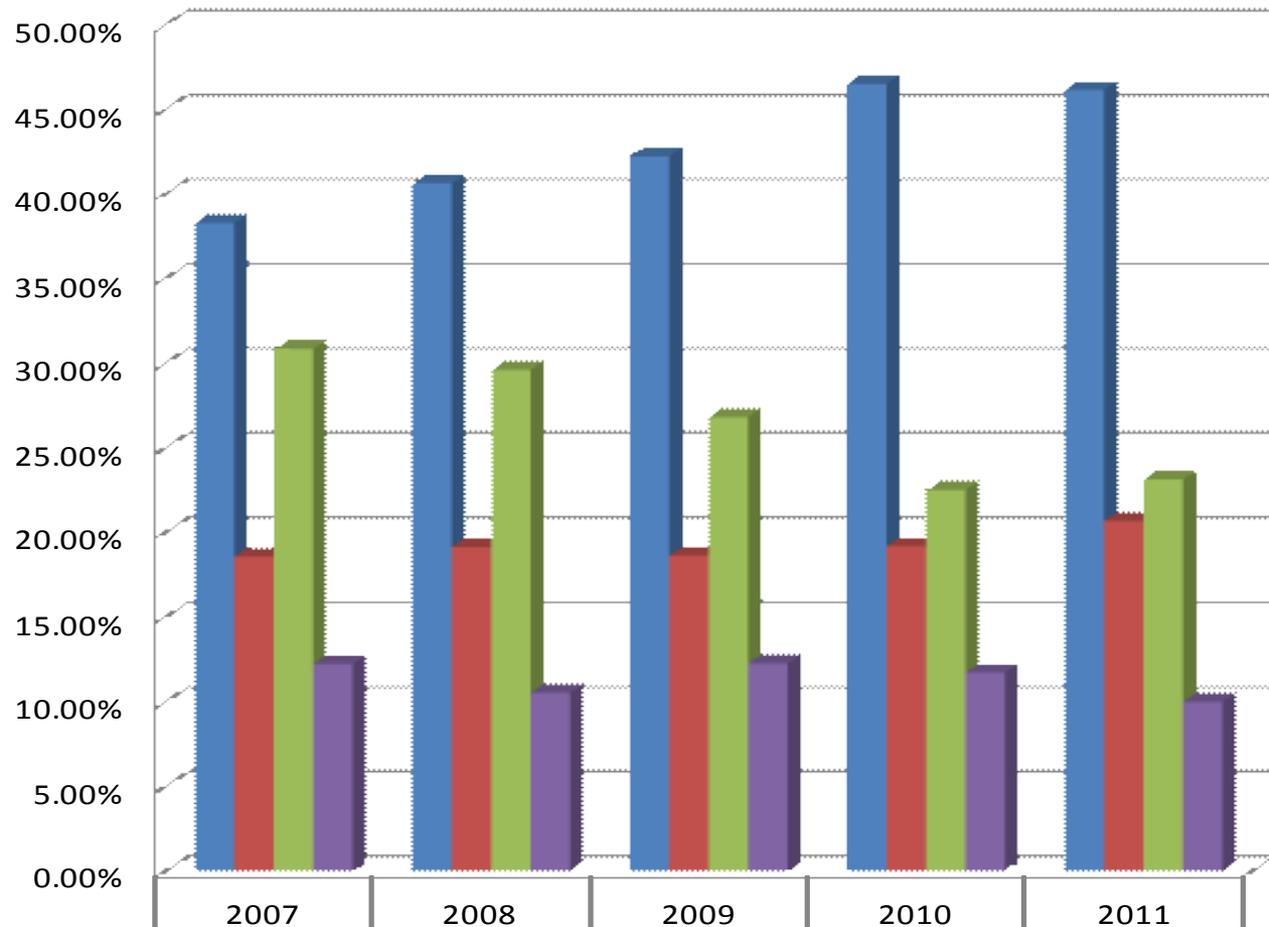


■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

Trend Komposisi Belanja Daerah

Note: data APBD konsolidasi secara nasional

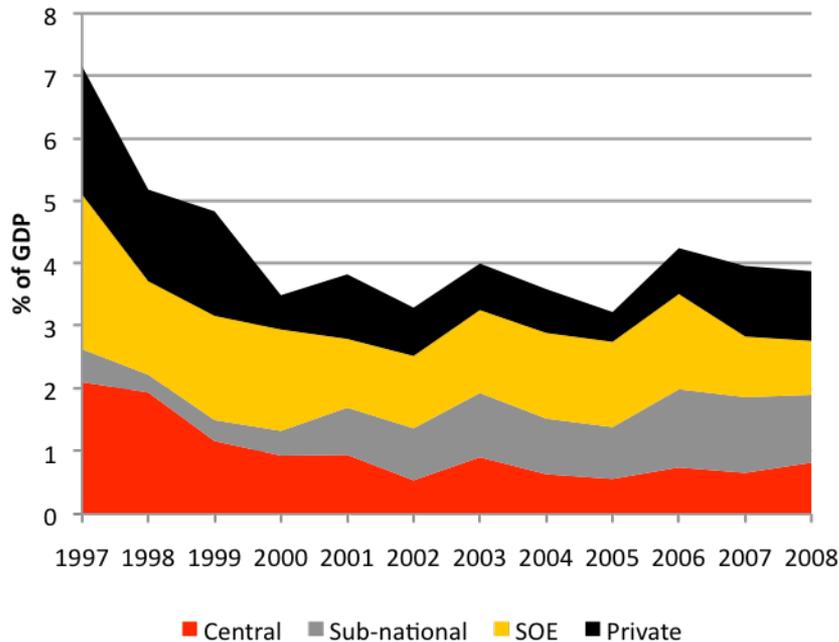
- Porsi belanja pegawai selalu dominan dibandingkan jenis belanja lainnya. Pada tahun 2011, porsi belanja pegawai sbsr 46,16% turun sedikit dibandingkan tahun 2010 .
- Porsi belanja modal mengalami trend menurun selama 2007-2011. Pada tahun 2011, porsis belanja modal terhadap total belanja hanya mencapai 20,7%.



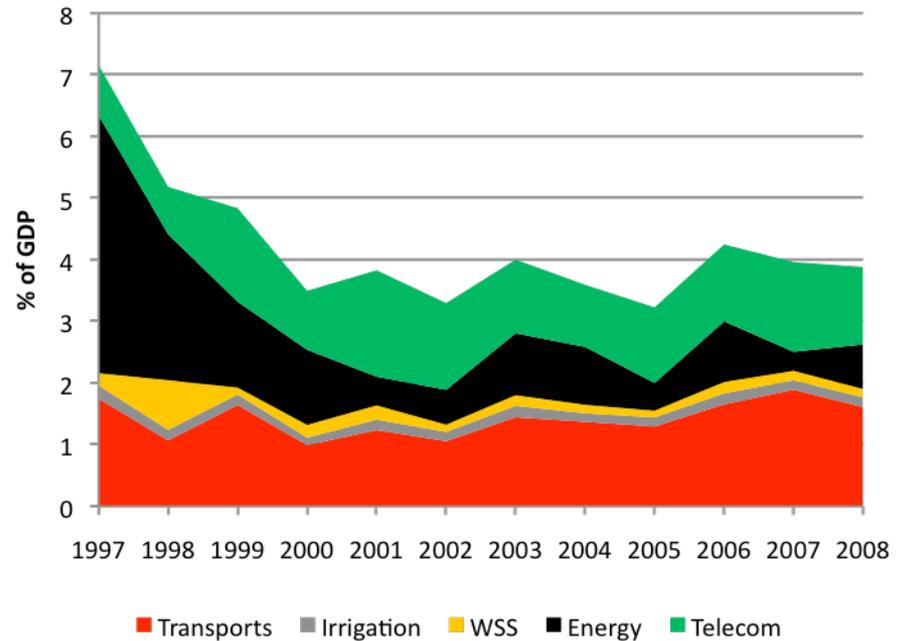
■ Belanja Pegawai	38.29%	40.65%	42.25%	46.52%	46.16%
■ Belanja Barang dan jasa	18.58%	19.16%	18.64%	19.21%	20.69%
■ Belanja Modal	30.87%	29.63%	26.83%	22.53%	23.14%
■ Belanja Lainnya	12.25%	10.55%	12.29%	11.74%	10.01%

Anggaran Publik Tidak Cukup Membiayai Infrastruktur

▶ Total investment in infrastructure, by sources

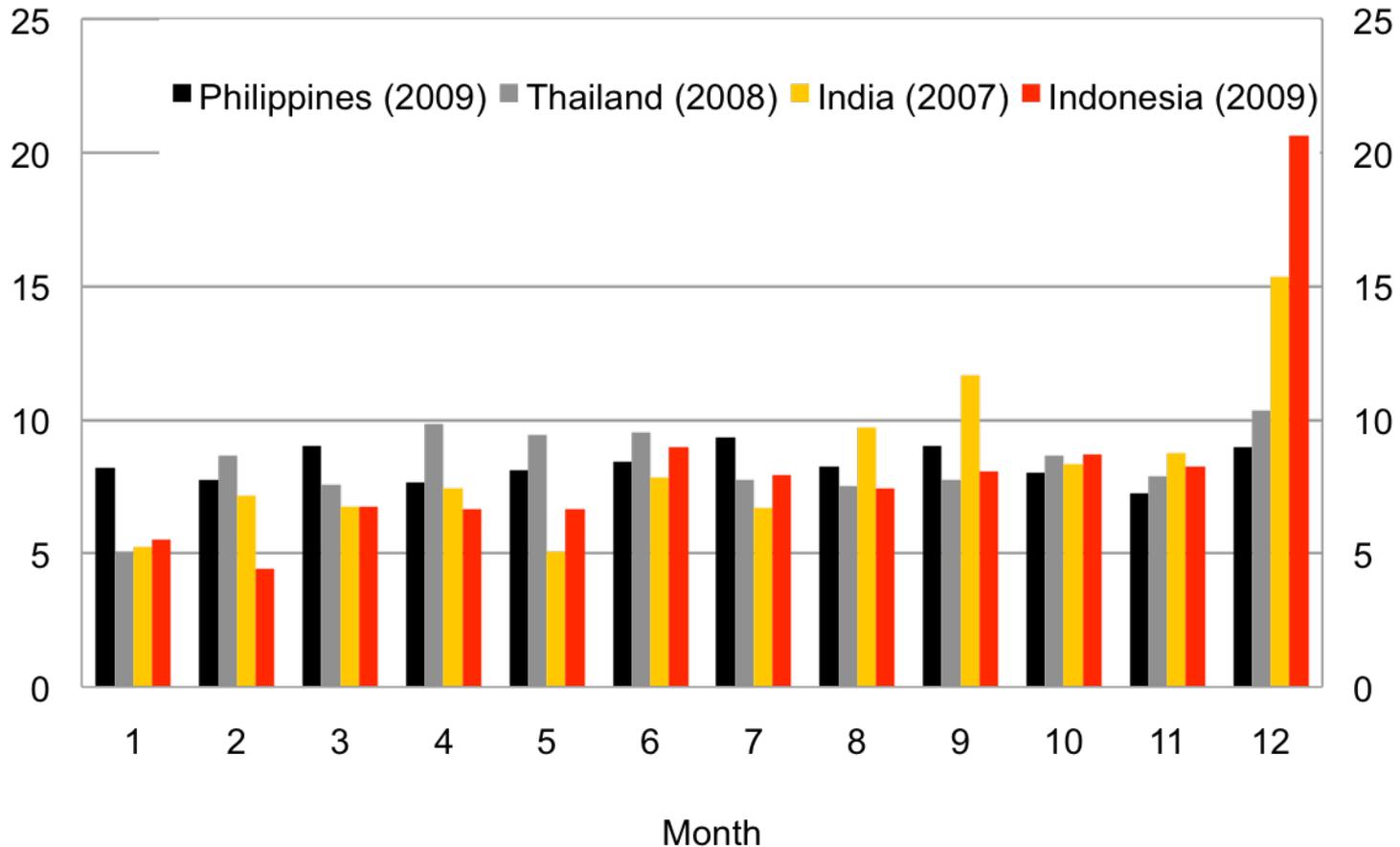


▶ Total investment in infrastructure, by sectors



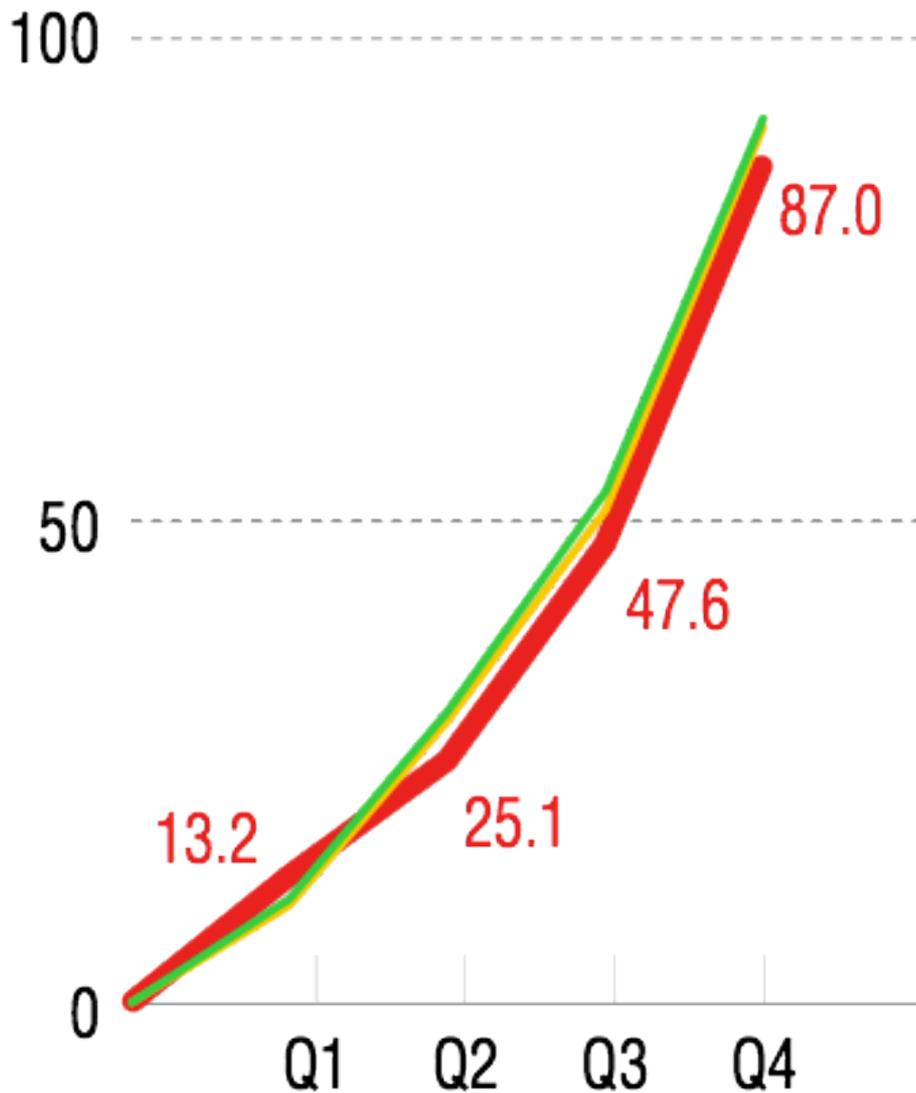
Sources: BPS via CEIC, World Bank

Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



Source: CEIC, World Bank

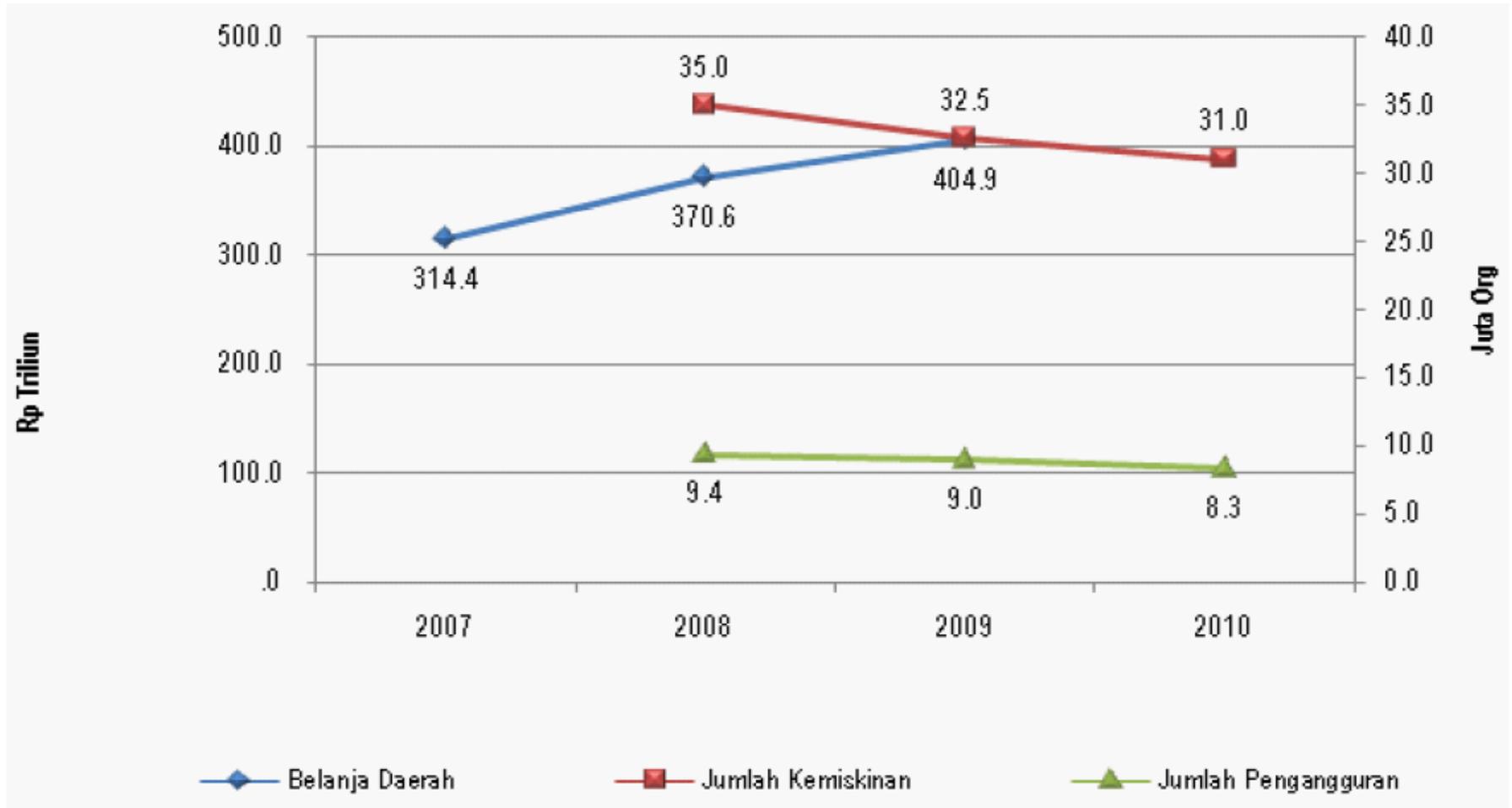
Serapan anggaran 2011



- **Presiden tidak senang** dengan prestasi serapan yang terendah dalam 3 tahun
 - (2009 : 91,8 %)
 - (2010 : 90,9 %)
 - (2011 : 87,0 %)
- Sebesar 270 Triliun terserap hanya di 1 bulan (Desember)
- Terlihat bahwa di Q1 birokrasi belum berbuat banyak selain administrasi gaji

Korelasi Belanja Daerah dg Kemiskinan & Pengangguran

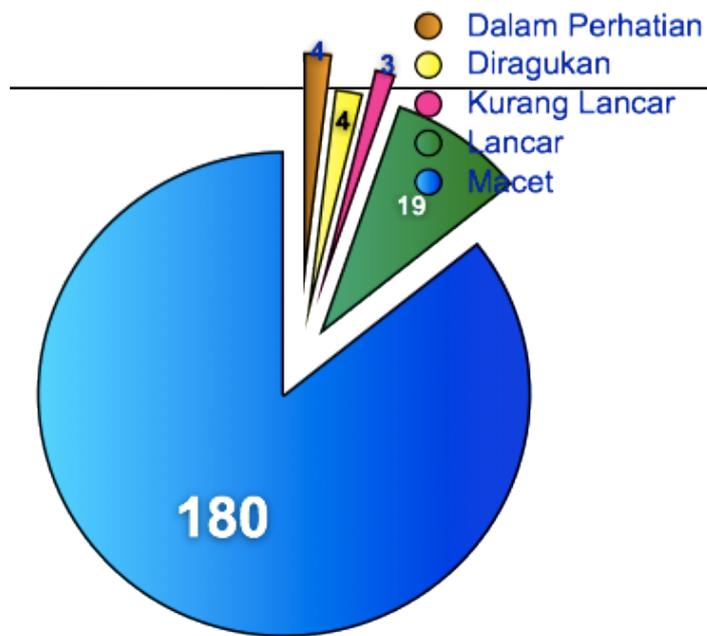
10



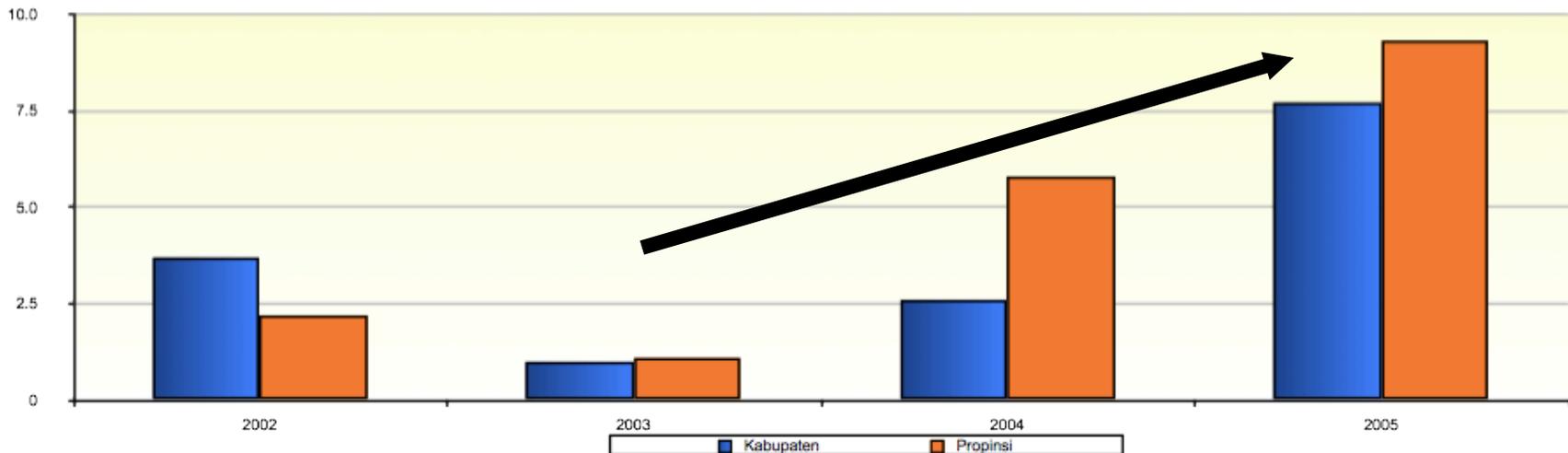
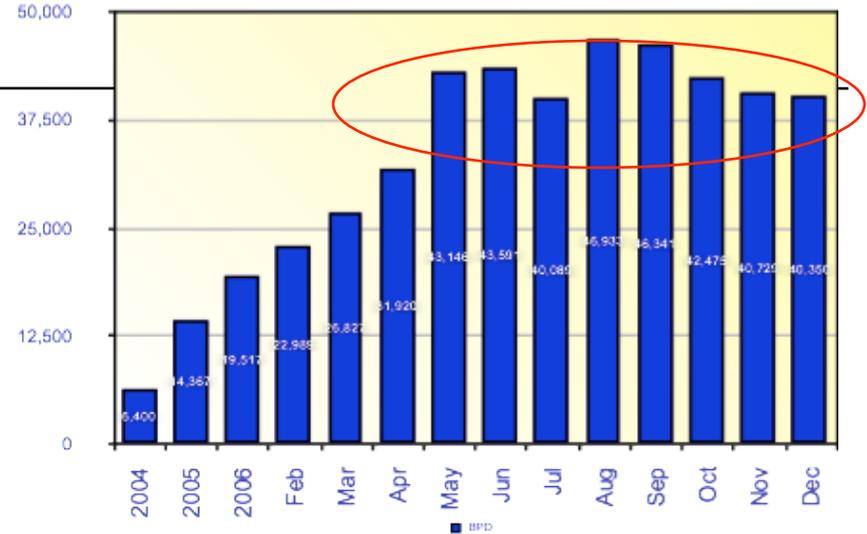
Sumber: DJPK, Kemkeu, 2011

Masalah-masalah Fiskal Daerah

Jumlah PDAM per Status Kredit



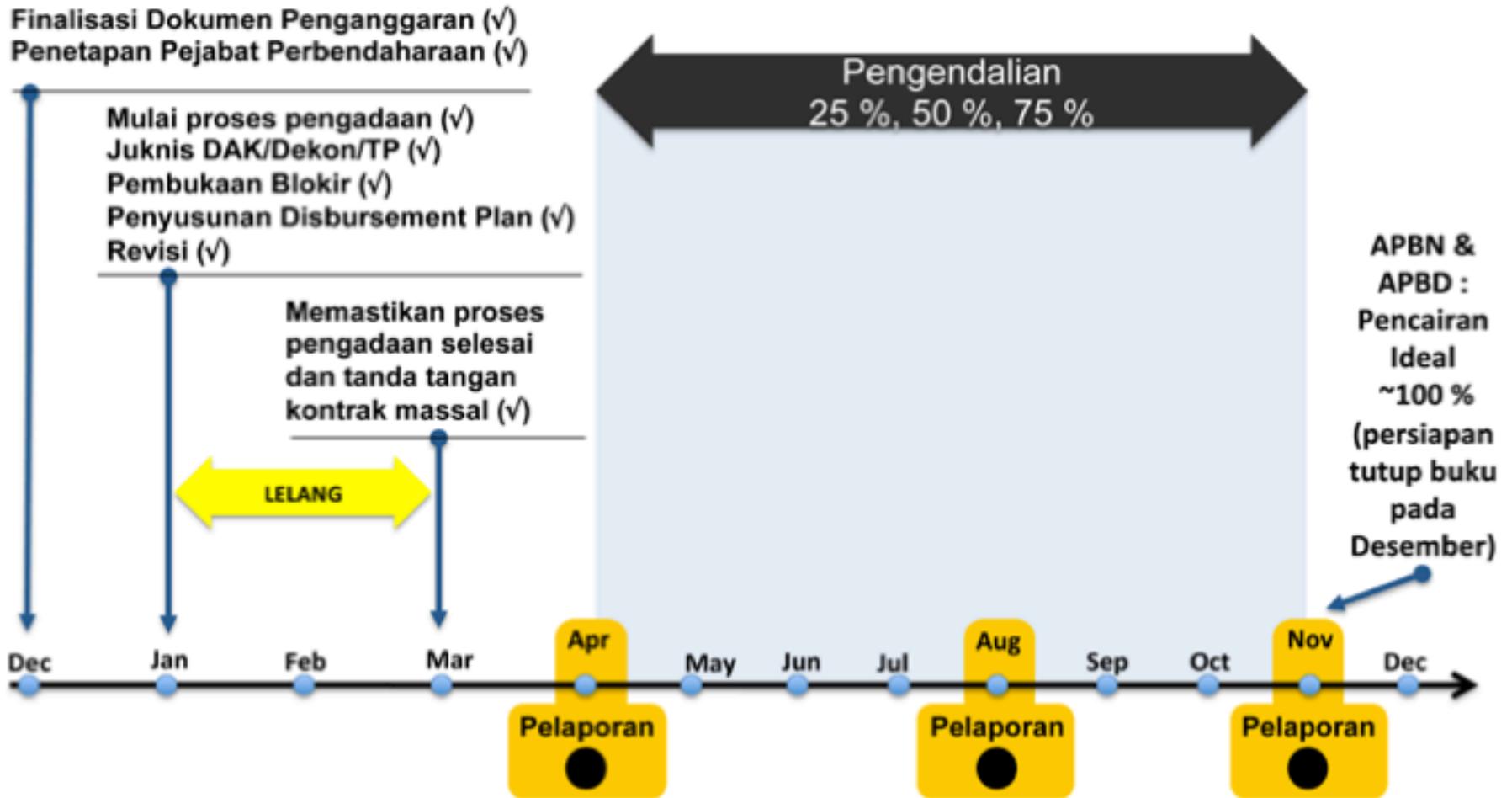
Nilai Pemilikan SBI 1 Bulan dari BPD



Kebijakan Teknis Percepatan Serapan

	No surat	Isi Surat	Deadline	Dilaporkan
1	TEP/S-1	Percepatan Pelaksanaan Proses Lelang (a. Lelang, b. TT Kontrak)	a. 13 Jan 2012 b. 16 Mar 2012	a. 16 Jan 2012 b. 19 Mar 2012
2	TEP/S-2	Percepatan Penetapan Pejabat Perbendaharaan	30 Des 2011	5 Jan 2012
3	TEP/S-3	Penyusunan Juknis Pelaksanaan DAK, Dana Dekon TP th. 2012	-	14 Jan 2012
4	TEP/S-4	Kelengkapan Data Dukung Administratif Penganggaran	30 Des 2011	5 Jan 2012
5	TEP/S-5	Penyusunan Disbursement Plan untuk Percepatan Penyerapan	13 Jan 2012	16 Jan 2012
6	TEP/S-7	Penunjukan Petugas Penghubung (<i>contact person</i>) di K/L	-	-

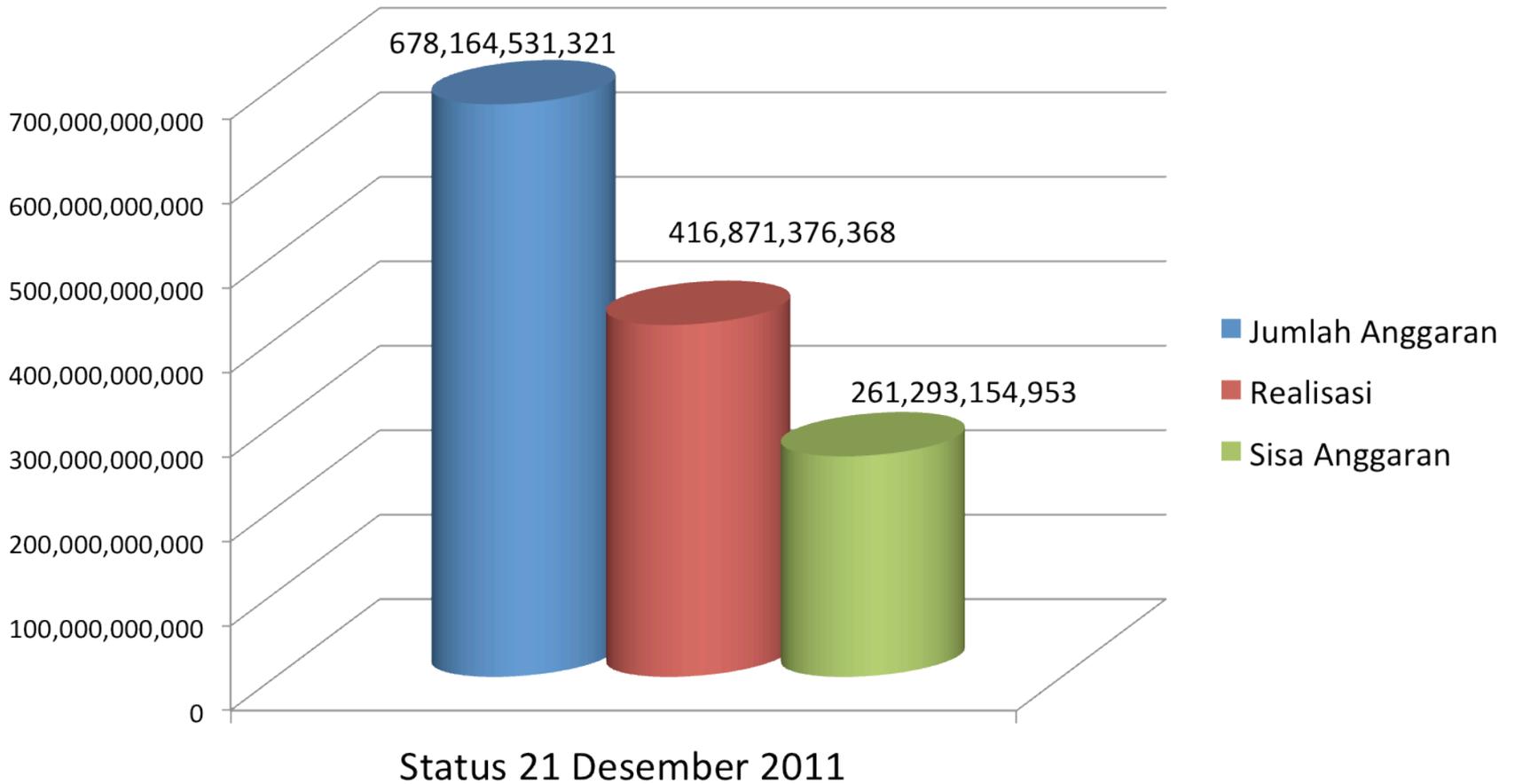
Debottlenecking dan Pengendalian Anggaran Th 2012



APBD Prov DIY 2011

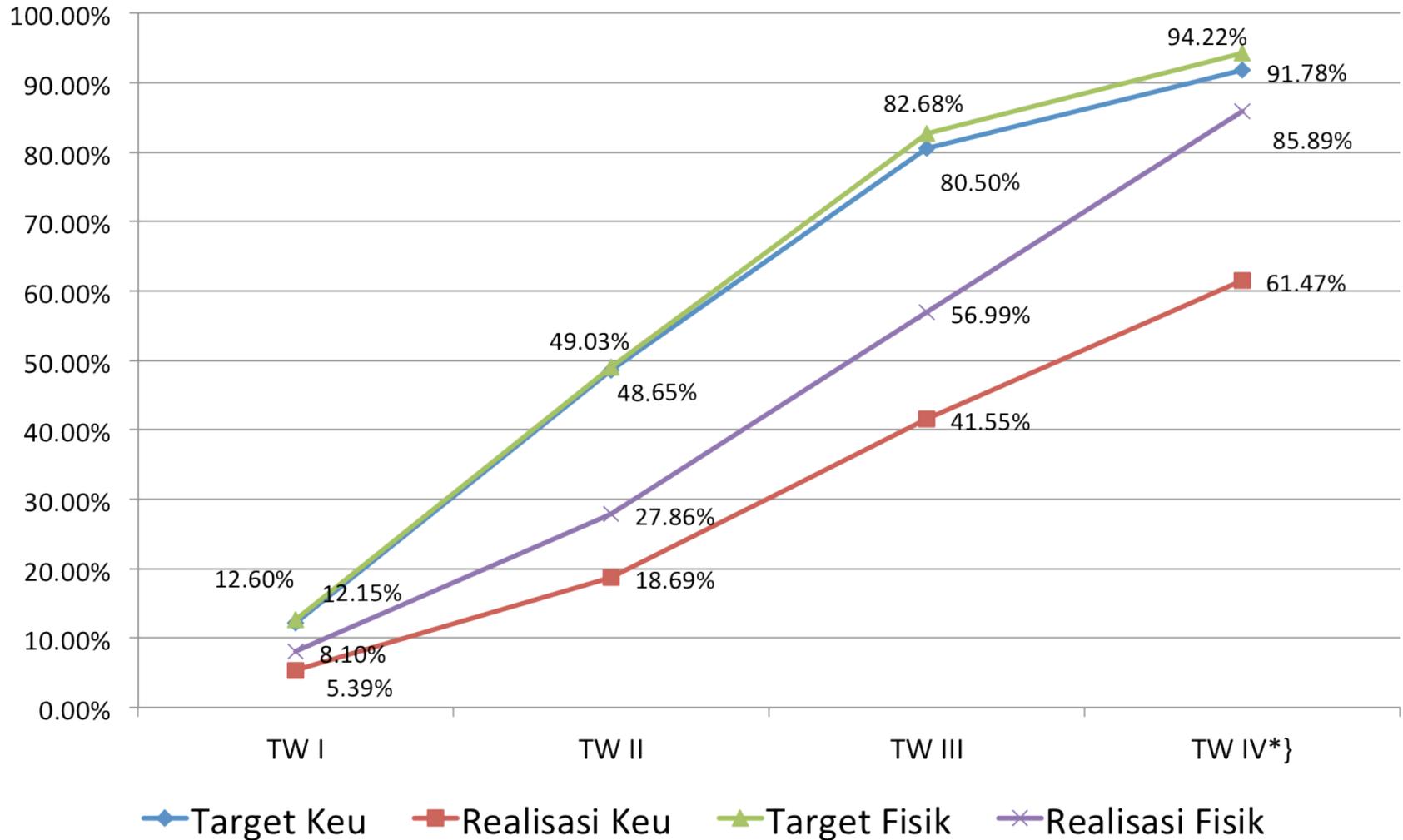
Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		1,419,475	89.23
	Pendapatan Asli Daerah	700,339	44.02
	Dana Perimbangan	714,542	44.92
	Pajak Daerah	592,499	37.25
	Retribusi Daerah	37,709	35.66
	Lain-lain Pendapatan	39,574	2.49
Total Belanja		1,590,786	100.00
Belanja Tidak Langsung		849,118	53.38
	Belanja pegawai	443,440	27.88
	Hibah	7,619	0.48
	Bantuan sosial	105,752	6.65
	Bantuan keuangan	67,180	4.22
	Belanja tidak terduga	10,000	0.63
Belanja Langsung		741,667	46.62
	Belanja pegawai	90,164	5.67
	Belanja barang & jasa	501,330	31.51
	Belanja modal	150,174	9.44
Pembiayaan Daerah		171,311	10.77
	SiLPA	184,395	11.59
	Pengeluaran	32,115	2.02
Defisit		-171,311	-10.77

REALISASI APBD PER 21 DES 2011



Sumber Data : http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd

Target dan Realisasi Pelaksanaan APBD Provinsi DIY per Tri Wulan TA 2011



Catatan :

- Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.

Rekapitulasi Capaian Penyelesaian Kegiatan Program Utama

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan :

1. Sumber data Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Provinsi DIY
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?

Realisasi Program/Kegiatan per 21 Desember 2011

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $\leq 10\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
1	Biro Organisasi	80,86	80,71	0,15	81,94	82,37	-0,43
2	Balai Metrologi	86,64	85,82	0,82	93,82	95,99	-2,17
3	Biro Hukum	91,50	89,85	1,65	91,46	94	-2,54
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	87,79	84,57	3,22	97,22	96,32	0,90
5	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	59,24	55,81	3,43	70,03	90,55	-20,52
6	Balai Laboratorium Kesehatan	71,19	67,72	3,47	91,94	90,47	1,47
7	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	99,69	95,88	3,81	99,72	96,3	3,42
8	KPPD di Kabupaten Bantul	79,92	74,94	4,98	79,65	75,49	4,16
9	Panti Sosial Bina Remaja	93,63	87,91	5,72	93,83	90,21	3,62
10	Panti Sosial Bina Karya	92,47	86,38	6,09	92,47	86,38	6,09

Realisasi Program/Kegiatan per 21 Desember 2011

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $\leq 10\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
11	Panti Sosial Karya Wanita	94,29	88,10	6,19	94,29	88,17	6,12
12	Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	100,00	93,70	6,3	100	95,75	4,25
13	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	98,21	91,36	6,85	98,2	91,52	6,68
14	Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	99,67	92,35	7,32	97,01	95,26	1,75
15	Dinas Sosial	83,56	74,65	8,91	84,68	81,13	3,55
16	Panti Sosial Bina Netra	79,58	70,54	9,04	79,58	79,58	0,00

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $10\% \leq 20\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
1	Panti Sosial Tresna Wreda	93,23	83,11	10,12	93,48	92,84	0,64
2	Trans Jogja	88,66	78,30	10,36	79,27	78,27	1,00
3	Biro Administrasi Pembangunan	93,07	81,40	11,67	92,14	91,53	0,61
4	Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	93,47	81,76	11,71	93,61	87,37	6,24
5	Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan	94,30	82,18	12,12	95,11	91	4,11
6	Kantor Perwakilan Daerah	91,35	78,96	12,39	91,54	96,36	-4,82
7	Dinas Pertanian	85,53	72,02	13,51	85,53	78,61	6,92
8	Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnos	91,78	77,82	13,96	91,28	78,05	13,23

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $10\% \leq 20\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94,65	80,17	14,48	95,85	94,38	1,47
10	Biro Umum, Humas, dan Protokol	92,95	77,13	15,82	92,52	87,61	4,91
11	Satuan Polisi Pamong Praja	98,15	82,20	15,95	98,15	82,31	15,84
12	Dinas Kesehatan	79,26	62,49	16,77	82,25	84,28	-2,03
13	Badan Lingkungan Hidup	96,00	78,89	17,11	98,67	80,59	18,08
14	Dinas Pariwisata	96,45	78,32	18,13	91,98	85,37	6,61
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	85,78	66,66	19,12	93,28	87,73	5,55
16	KPPD di Kabupaten Kulonprogo	99,27	79,32	19,95	99,27	85,65	13,62

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $20\% \leq 30\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
1	Panti Sosial Asuhan Anak	95,46	74,51	20,95	95,57	94,4	1,17
2	Biro Tata Pemerintahan	98,09	74,86	23,23	98,35	88,77	9,58
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	97,98	74,71	23,27	97,96	83,56	14,40
4	Inspektorat	98,83	74,77	24,06	95,72	80,06	15,66
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,28	66,47	24,81	93,12	82,43	10,69
6	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air	98,83	73,76	25,07	98,83	96,46	2,37
7	Dinas Kebudayaan	90,82	65,00	25,82	91,54	76,22	15,32
8	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	99,12	72,72	26,4	99,22	86,74	12,48
9	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	88,33	61,45	26,88	80,6	78,12	2,48
10	Badan Kepegawaian Daerah	95,02	66,13	28,89	95,04	84,46	10,58
11	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	98,86	69,54	29,32	98,89	84,18	14,71
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,54	66,58	29,96	95,34	91,05	4,29

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $30\% \leq 40\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
1	Panti Sosial Pamardi Putra	96,59	66,27	30,32	96,77	92,7	4,07
2	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	92,86	62,13	30,73	93,87	82,07	11,80
3	KPPD di Kota Yogyakarta	98,39	67,62	30,77	98,39	85,57	12,82
4	Rumah Sakit Ghrasia	91,81	61,00	30,81	91,81	78,89	12,92
5	Badan Pendidikan dan Pelatihan	90,28	58,68	31,6	90,72	88,51	2,21
6	KPPD di Kabupaten Sleman	94,30	62,13	32,17	94,3	62,88	31,42
7	Balai Pemuda Dan Olah Raga	99,54	67,10	32,44	99,22	92,26	6,96
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	98,18	65,27	32,91	97,91	70,33	27,58

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $30\% \leq 40\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,01	66,79	33,22	97,05	80,13	16,92
10	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	82,22	48,35	33,87	81,46	74,29	7,17
11	Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru	94,53	60,43	34,1	96,27	75,98	20,29
12	KPPD di Kabupaten Gunung Kidul	105,47	70,77	34,7	92,76	85,51	7,25
13	Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan	98,32	62,15	36,17	98,62	85,06	13,56
14	Balai Latihan Pendidikan Teknik	96,76	60,21	36,55	96,8	84,31	12,49
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	93,27	53,96	39,31	98,21	87,25	10,96

PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $\geq 40\%$

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
1	Sekretariat DPRD	99,43	59,18	40,25	99,27	67,1	32,17
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	90,23	45,42	44,81	98,5	92,98	5,52
3	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	96,89	49,26	47,63	97,23	65,59	31,64
4	Pelabuhan dan Perikanan Pantai	99,75	40,59	59,16	99,75	99,87	-0,12

Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan/dilaksanakan sampai akhir tahun

No.	Nama PA/KPA	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	DPPKA	Pembebasan tanah eks Bioskop Indra	proses negosiasi belum selesai
2	Dinas Pertanian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional *	Bea Balik Nama Kendaraan dari Pusat/ Kementrian tidak direalisasi
3	BPBPTDK Dinas Pertanian	Pengadaan Reservoir Ngipiksari	Sumber air tertutup erupsi merapi
4	BPPTPH Dinas Pertanian	Pengadaan Proktor Padi UPT	Terjadi kenaikan harga pasar
5	Dinas Pariwisata	Pameran CITM di China	Jadwal penyelenggaraan maju ijin dari Sekda tidak keluar
6	Dinas Pariwisata	Pemasangan iklan di majalah Malaysia	Dana tidak mencukupi

Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan/dilaksanakan sampai akhir tahun

No.	Nama PA/KPA	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
7	Dinas Kehutanan	Optimalisasi Tegakan kayu putih	target 522.000 baru terpenuhi 255.000 (bersertifikasi) proses pengadaan dilaksanakan oleh BP3KP terlambat.
8	Trans Jogja	Jalur 4 belum beroperasi	20 Bus masih plat merah
9	Badan Diklat	Diklat Prajab dari luar provinsi DIY 23 angkatan, tidak terealisasi 4 angkatan	Daerah di luar provinsi DIY memiliki kebijakan untuk melaksanakan diklat sendiri di daerah masing-masing
10	BP4	Pembangunan Rumah Sakit*	Terjadi kendala dalam negosiasi pembebasan tanah. tidak ada kesepakatan antara Bp4 dengan pemilik tanah tentang harga tanah
11	RS Grhasia	Akreditasi Rumah Sakit	Persyaratan belum lengkap (dilaksanakan 2012)

Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan/dilaksanakan sampai akhir tahun

No.	Nama PA/KPA	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
11	Dinas Nakertrans	Target 175 Transmigran tidak tercapai	2 lokasi gagal sebanyak 50 kk (Tanah Tidung Kaltim dan Sambas Kalbar)
12	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan instalasi telpon	Dilaksanakan biro umum
13	BKPM	Pendampingan gubernur ke Chiang mai	Dilaksanakan Tahun 2012 karena Bencana Banjir di Thailand
14	BKPM	Kerjasama dengan St. Petersburg	belum disetujui oleh DPRD
15	Biro Tata Pemerintahan	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY masih dalam pembahasan di DPR RI.

Mengapa Target Meleset?

- Deviasi yang tinggi antara target dan realisasi karena:
 1. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan
 2. Ada keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain
 3. Perencanaan aliran Kas yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan
 4. Bencana alam
 5. Dana tidak mencukupi.

Aspek mana yang dapat segera diperbaiki?

Catatan Umum Tim Monev

1. Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik sangat rendah apabila dibandingkan dengan target
2. Penyelesaian program/kegiatan cenderung “menumpuk” diakhir tahun, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat penyelesaian kegiatan sampai triwulan 3
3. ROPK belum digunakan secara efektif sebagai alat pengendalian
4. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan belum disampaikan secara lengkap melalui laporan web monev

Rekomendasi Tim Monev Bappeda

1. Pelaksanaan program/kegiatan pada TA yang akan datang harus mendekatkan antara target dan realisasi
2. Penjadwalan kegiatan harus ditata dengan baik sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun
3. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada ROPK – sesuai target yang sudah ditetapkan
4. Mengefektikan pengendalian internal di tingkat PA/KPA
5. Melakukan revisi terhadap perencanaan kas yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan

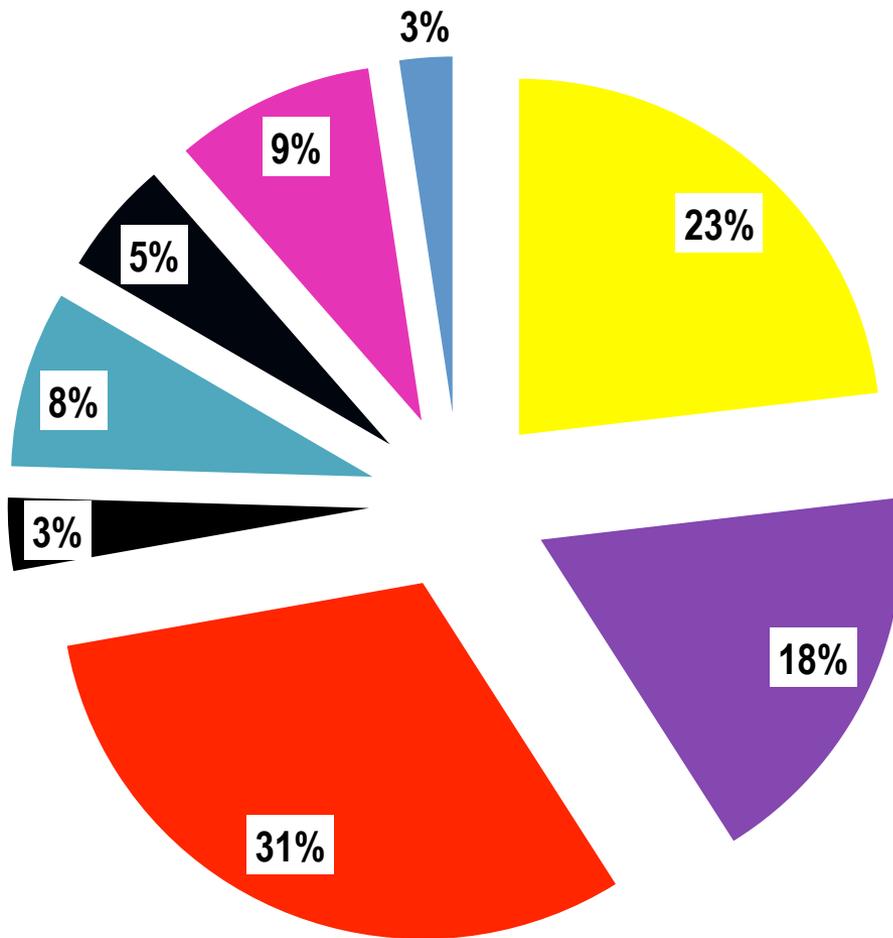
Format Laporan

Capaian Kinerja Indikator RKPD 2011 Provinsi DIY

No.	Indikator RKPD	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Kendala	Solusi
1	Angka Melek Huruf	Persen	98,93				
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,05				
3	Angka Partisipasi Kasar :						
	a. PAUD	Persen	75				
	b. SD/MI	Persen	107				
						

Data disampaikan ke BAPPEDA setiap akhir TA (sebelum APBD TA berikut disahkan).
Laporan dalam format MS Excel.

Kesulitan Pokok Pendanaan DAK

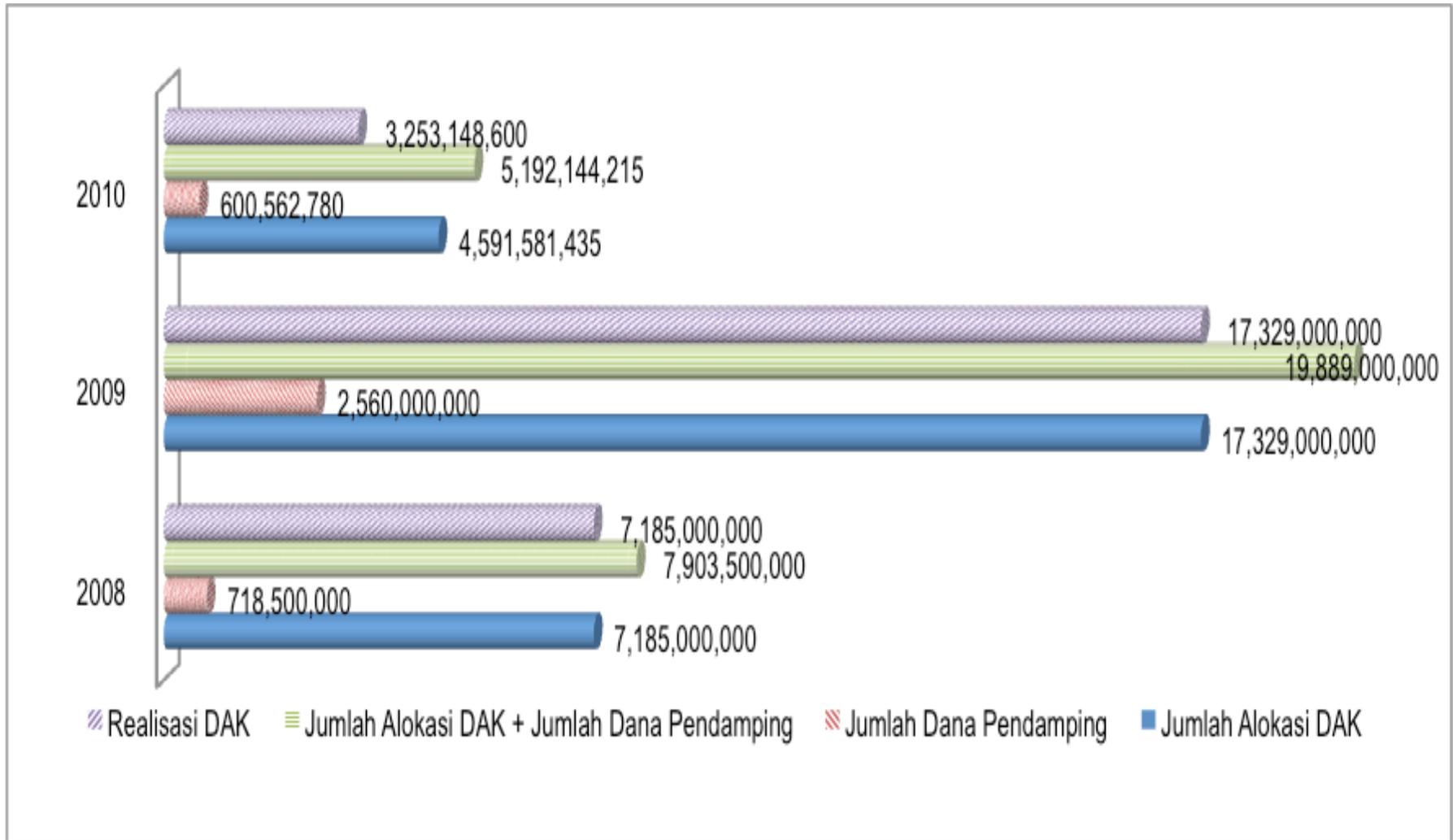


- Penggunaan terlalu kaku
- Kepastian besarnya dana yang diterima selalu terlambat
- Juklak dan Juknis sering terlambat
- Pelaporannya susah
- Sulit dikoordinasikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah
- Sulit dikoordinasikan dengan pelaksanaan program/kegiatan SKPD
- Sulit mencari dana pendamping
- Lainnya: Kebijakan keuangan daerah tidak selaras dengan juklak dan juknisnya (DAK) menyulitkan pelaksanaan kegiatan

Isu Kebijakan

- Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004. Bgm UU No.25/2004 ttg SPPN? Apakah koordinasi antar kementerian sudah berjalan?
- Perbaiki mekanisme transfer ke daerah dengan dikeluarkannya PMK No. 126 Tahun 2010. Apakah sudah berhasil menjawab persoalan tentang DAK?
- Pembentukan TPID (Tim Pemantau Inflasi Daerah) yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia. Apa implikasi terhadap pendanaan melalui DAK?
- Dengan penguatan peran Gubernur (PP 19/2010, PP 23/2011), apakah monev pendanaan DAK dapat diperbaiki? Bagaimana mekanismenya?

Penerimaan DAK Infrastruktur Jalan di Prov. DIY



Penguatan Peran Gubernur

(Materi PP 19/2010 & PP 23/2011)

1. Gubernur adalah koordinator instansi vertikal, koordinator dan pengawas/pembina Pemkab/Pemkot
2. Wajib menjaga keutuhan NKRI
3. Membina dan mengawasi pendanaan tugas-pembantuan
4. Menetapkan Sekda Kab/Kota
5. Mengevaluasi Raperda APBD
6. Raker dg Gub sedikitnya 2 kali setahun
7. Gub memberikan penghargaan / sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan kinerja
8. Gub dapat mengundang rapat ke K/L terkait koordinasi program/kegiatan
9. Forum koordinasi pimpinan daerah: Gub, Ka DPRD Prov, Pangdam, Kapolda, Kajati
10. Sanksi: peringatan tertulis bagi bupati yg mangkir (tembusan Kemdagri & Ka DPRD); pembatalan alokasi dana tugas pembantuan

Kelemahan Prosedur Monev di DIY

1. Transparansi sudah lebih baik dengan dokumen Monev + Pelaporan on-line melalui Website. Tetapi data sering kurang sinkron (Mis: pagu anggaran APBD vs. Web Monev).
2. Laporan Monev kurang komprehensif (fisik, keuangan, capaian). Tidak ada keterangan yg jelas mengenai hambatan/kendala.
3. Inkonsistensi antar laporan (menurut PP 39/2006, Peraturan Menteri Teknis, format LAKIP, format LPPD, dsb).
4. Kurangnya ketepatan waktu pelaporan menghambat perencanaan untuk TA berikut dan pencairan dananya.

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DIY

1. PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
2. JAMKESTA
3. SELOKAN MATARAM
4. KALI MANUNGGAL
5. KOTA GEDHE
6. JAGANG VREDEBURG
7. TANJUNG ADIKARTO
8. JTT (tinjuc evaluasi)
9. BARON TECHNO PARK
10. KAWASAN STASIUN TUGU
11. AIR PORT INTERNASIONAL KULON PROGO
12. JJLS
13. DESIGN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

KONDISI

PEMB.GED.PERPUST

Waktu : 3 THN (2011-2013)

Total Anggaran : 76,105

2011 DED, PPAS 2012 : 33,5M

JAMKESTA

Waktu : 2 THN (2012, 2013)

Total Anggaran : 180M

PPAS 2012 : 50M

2011 : Tersusun Program Jamkesta 5 Thn (Ro Kesra)

SELOKAN MATARAM

Waktu : 6 THN (2010 – 2015)

Total Anggaran : 39,260M

PPAS 2012 : 16,6M

Pembebasan lahan dan sharing anggaran dari Kab.

Sleman belum Jelas

KALI MANUNGGAL(1,6Km)

Waktu : 6 THN (2008 – 2013)

Total Anggaran : 36M

PPAS 2012 : tidak ada (kebutuhan 2M)

Progres saat ini : Provinsi 0,7 Km; Kota 0,4 Km

KotaGedhe

Waktu : 3 THN (2012 – 2014)

Total Anggaran : 19,090M

PPAS 2012 : 75Jt (kebutuhan 3,58M)

Membutuhkan sinergitas lintas sektoral dan lintas kab/kota

JAGANG VREDEBURG

Waktu : 3 THN (2011 – 2013)

Total Anggaran : 4M

PPAS 2012 : 2M (kebutuhan 4M)

KONDISI

TANJUNG ADIKARTO

Waktu : 14 THN (2000-2013)

Total Anggaran : 479.362.447.911,00

PPAS 2012 : 14.199.620.000 (Kebutuhan 56.761.931.545)

Kawasan pelabuhan overlapping dg kontrak PT.JMI, shg diperlukan komitmen bersama antara PT.JMI dan Pem.Prov.DIY dlm rangka pemanfaatan pelabuhan
Komitmen Pemerintah dlm hal penganggaran
pengerukan melalui APBN berubah-ubah.

JTT (tinjau evaluasi)

Waktu : 1 THN (2012)

Total Anggaran : tidak ada

PPAS 2012 : tidak ada

Penyelesaian Plat Kuning oleh pihak Kepolisian.

BARON TECHNO PARK

Waktu : 7 THN (2010 – 2016)

Total Anggaran : dilakukan oleh investor

PPAS 2012 : 400Jt

Kebutuhan dana dari APBD Provinsi DIY : Penyusunan DED dan pembangunan jalan masuk.

KAWASAN STASIUN TUGU

Waktu : 4 THN (2011 – 2014)

Total Anggaran : dilakukan oleh investor

PPAS 2012 : fasilitasi koordinasi

Telah ada MOU antara Pemprov, Pemkab dan BPPT.
2012 disusun DED

Masalah: Pembebasan lahan dan dukungan infrastruktur

INTERNATIONAL AIRPORT KP

Waktu : ? THN (2008 – 20??)

Total Anggaran : dilakukan oleh investor

PPAS 2012 : Masterplan kawasan terpadu

Ada MOU antara Pemprov dgn PT. Angkasa Pura II

JJLS

Waktu : ? THN (2008 – 20??)

PPAS 2012 : 7,5M (kebutuhan 20M)

Pembebasan lahan, butuh waktu 40Thn apl ditanggung Pemda. Fisik jalan: Pusat; Tanah : 90% prov-10%kab.

DESIGN P'ENTASAN KEMISKINAN

Referensi SCBD, proses koordinasi dg kab/kota

Monev dan TKD

- TPP diberikan sejak TA 2011 → akan dirancang sebagai TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) mulai TA 2012.
- Ukuran kinerja SKPD: target vs. realisasi pelaksanaan program/kegiatan (dokumen Monev).
- TKD yg ideal terkait dg kinerja individu, bukan hanya SKPD.
- TKD individu dpt dimulai dari presensi (tambahkan spesifikasi kriteria yg jelas), lalu dikembangkan dengan variabel-variabel kinerja yg objektif.
- Replikasi TKD dari provinsi / daerah lain: pilih yang benar-benar menunjang kinerja, TKD sebaiknya tidak melekat pada jabatan struktural.

Perintisan TKD di Prov Gorontalo

Tabel 1. Disiplin sebagai ukuran kinerja

No.	Kode	Keterangan
1.	TD	Terlambat datang
2.	PC	Pulang cepat
3.	TH-1	Tidak hadir tanpa ijin dan surat sakit
4.	TH-2	Tidak hadir krn ijin atau sakit lebih dari 4 kali
5.	TH-3	Tidak hadir karena Diklat Teknis dan Struktural
6.	MTJKTI	Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa ijin
7.	TMKK	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/rapat/senam

Tabel 2. Pengembangan TKD Berbasis Kinerja

Tahun	Disiplin	Pencapaian Kinerja
2004	100%	0%
2005	60%	40%
2006	30%	70%
2007 dst	10%	90%

Perintisan TKD di Prov DKI Jakarta (Per 2010)

No	Keterangan	Tunjangan
1	Deputi Gubernur	35,000,000
2	Asisten Deputi Gubernur	20,000,000
3	Kepala Sekolah Negeri (TK, SD,SMP,SMA,SMK,SLB)	3,150,000
	Kepala Puskesmas Kelurahan	3,150,000
4	PNS di SKPD/UKPD kecuali Kepala Puskesmas Kelurahan	2,900,000
	Jabatan Fungsional Guru	2,900,000
	Jabatan Fungsional Widyaiswara	2,900,000
	Jabatan Fungsional Kesehatan	2,900,000
5	CPNS	1,750,000

Catatan:

1. TKD sebaiknya tidak melekat ke jabatan struktural, tetapi pada fungsi dan kinerja.
2. Kriteria penilaian kinerja yg tidak baku / tidak objektif akan mengaburkan tujuan pemberian TKD dan tidak akan meningkatkan kinerja Pemda.

Tantangan bagi SKPD di Pemprov pada era desentralisasi adalah koordinasi pembangunan di daerah dan peningkatan kinerja, serta memastikan bahwa anggaran publik memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

TERIMA KASIH